

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Konsep Bentuk Prilaku Golput

1. Pengertian Prilaku

Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak tampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan (Okviana, 2015).

Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya (Notoatmojo, 2010).

Sedangkan menurut Wawan (2011) Perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Skinner (1938) dalam Notoatmodjo (2011) merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar).

Pengertian ini dikenal dengan teori „S-O“R” atau “Stimulus-Organisme-Respon”. Respon dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Respon respondent atau reflektif Adalah respon yang dihasilkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu. Biasanya respon yang dihasilkan bersifat relatif tetap disebut juga eliciting stimuli. Perilaku emosional yang menetap misalnya

orang akan tertawa apabila mendengar kabar gembira atau lucu, sedih jika mendengar musibah, kehilangan dan gagal serta minum jika terasa haus.

2. Operan Respon Respon operant atau instrumental respon yang timbul dan berkembang diikuti oleh stimulus atau rangsangan lain berupa penguatan. Perangsang perilakunya disebut reinforcing stimuli yang berfungsi memperkuat respon. Misalnya, petugas kesehatan melakukan tugasnya dengan baik dikarenakan gaji yang diterima cukup, kerjanya yang baik menjadi stimulus untuk memperoleh promosi jabatan.

2. Jenis-jenis perilaku

Jenis-jenis perilaku individu menurut Okviana(2015):

1. Perilaku sadar, perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf,
2. Perilaku tak sadar, perilaku yang spontan atau instingtif,
3. Perilaku tampak dan tidak tampak,
4. Perilaku sederhana dan kompleks,
5. Perilaku kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor.

3. Bentuk-Bentuk Perilaku

Menurut Notoatmodjo (2011), dilihat dari bentuk respons terhadap stimulus, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua.

1. Bentuk pasif /Perilaku tertutup (covert behavior) Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respons atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran dan sikap yang terjadi pada seseorang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.

2. Perilaku terbuka (overt behavior) Respons terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat orang lain.

4. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku

Menurut teori Lawrence Green dan kawan-kawan (dalam Notoatmodjo, 2007) menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku (behaviorcauses) dan faktor diluar perilaku (non behaviour causes). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor yaitu:

1. Faktor predisposisi (predisposing factors), yang mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya.

a. Pengetahuan apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses yang didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng (long lasting) daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang dalam hal ini pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai tingkatan (Notoatmodjo, 2007). Untuk lebih jelasnya, bahasan tentang pengetahuan akan dibahas pada bab berikutnya.

b. Sikap Menurut Zimbardo dan Ebbesen, sikap adalah suatu predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) terhadap seseorang, ide atau obyek yang berisi komponen-komponen cognitive, affective danbehavior (dalam Lingasari, 2008).

Terdapat tiga komponen sikap, sehubungan dengan faktor-faktor lingkungan kerja, sebagai berikut:

- 1) Afeksi (affect) yang merupakan komponen emosional atau perasaan.
 - 2) Kognisi adalah keyakinan evaluatif seseorang. Keyakinankeyakinan evaluatif, dimanifestasi dalam bentuk impresi atau kesan baik atau buruk yang dimiliki seseorang terhadap objek atau orang tertentu.
 - 3) Perilaku, yaitu sebuah sikap berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak terhadap seseorang atau hal tertentu dengan cara tertentu (Winardi, 2004). Seperti halnya pengetahuan, sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu: menerima (receiving), menerima diartikan bahwa subjek mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan. Merespon (responding), memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Menghargai (valuing), mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. Bertanggungjawab (responsible), bertanggungjawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap yang memiliki tingkatan paling tinggi menurut Notoatmodjo(2011).
2. Faktor pemungkin (enabling factor), yang mencakup lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana keselamatan kerja, misalnya ketersedianya alat pendukung, pelatihan dan sebagainya.
 3. Faktor penguat (reinforcement factor), faktor-faktor ini meliputi undang-undang, peraturan-peraturan, pengawasan dan sebagainya menurut Notoatmodjo(2007).

5. Pengertian Golput

Pemilu disajikan untuk mengetahui keinginan dan kehendak masyarakat tentang apa dan siapa dalam ukuran logika rakyat yang layak untuk memimpin, memberikan perubahan ataupun perbaikan nasib bagi seluruh rakyat dalam suatu negara (Limas Sutanto 2004: 4).

Partisipasi menjadi penting guna menentukan dan menilai penguasa. Pada masa orde baru, penguasa bercorak militeristik begitu kuat, kelompok civil society tak berdaya membendung berbagai kebijakan tak populis.

Kondisi demikian mendorong sekelompok intelektual yang dikomandoi Arif Budiman untuk menentang ketidakadilan struktural lewat gerakan moral. Gerakan moral ini kemudian dikenal dengan golongan putih (golput) yang dicetuskan pada 3 Juni 1971, sebulan menjelang pemilu. Pada awalnya golput merupakan gerakan untuk melahirkan tradisi di mana ada jaminan perbedaan pendapat dengan penguasa dalam situasi apapun.

Gerakan itu lahir didorong oleh kenyataan bahwa dengan atau tanpa pemilu, sistem politik waktu itu tetaplah bertopang kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sebagai contoh cara, penguasa melindungi dan mendorong kemenangan Golongan Karya (Golkar) dengan meminggirkan atau mengalahkan partai politik lain yang waktu itu berjumlah 10 kontestan atau partai untuk dapat bertanding merebut suara secara fair. Dalam konteks ini, cikal bakal di masa orde baru lahirnya golput merupakan gerakan moral yang ditujukan sebagai “mosi tidak percaya” kepada struktur politik yang coba dibangun oleh penguasa waktu itu.

Gerakan moral ini memberikan kesan pada publik bahwa putih dibandingkan dengan lawannya, yakni hitam, kotor. Pada perkembangan berikutnya, golput dimaknai sebagai protes dalam bentuk ketidakhadiran masyarakat ke tempat pemungutan suara atau keengganan menggunakan hak suaranya secara baik, atau dengan sengaja menusuk tepat dibagian putih kertas suara dengan maksud agar surat suara menjadi tidak sah, dan dengan tujuan agar kertas suara tidak disalah gunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu pula (Mohamad Asfar 2004:3)

Golput juga dimaknai sebagai perilaku apatisme (jenuh) dengan tema-tema pemilihan. Kejenuhan tersebut disebabkan oleh suatu kondisi psikologis masyarakat yang hampir tiap tahun mengalami pemilu, pilgub, pilkada dan bahkan pilkades. Disisi lain, penyelenggaraan pemilu yang berulang-ulang tak juga memberikan banyak hal terkait perbaikan nasib bagi masyarakat. Pada titik tertentu rasa jenuh tersebut sampai pada rasa tak peduli apakah dirinya masuk dalam daftar pemilih tetap atau tidak sama sekali. Dengan kata lain, golput merupakan akumulasi sikap jenuh masyarakat terhadap seputar pemilu baik janji politik, money politik dan kekerasan politik dan kondisi-kondisi pasca reformasi yang tak kunjung membaik (Soebagio,2008:10).

Sementara itu Priyatmoko mengartikan golput sebagai keengganan masyarakat menggunakan hak pilihnya pada even pemilu baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden maupun kepala daerah disebabkan rasa kecewanya pada sistem politik dan pemilu yang tak banyak memberikan perubahan apapun bagi kehidupan masyarakat (Priyatmoko 2001:2). Lain kata, masyarakat dalam

taraf ini telah berada dalam taraf kesadaran dalam memaknai pemilu. Bahwa setiap tindakan mereka dikaitkan dengan pertimbangan asas timbal balik secara seimbang.

Dari beberapa pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa golput adalah pilihan tidak memilih sebagai bentuk akumulasi rasa jenuh (apati) masyarakat yang nyaris setiap tahun mengalami pemilihan kepala daerah, golput juga sebagai reaksi atau protes atas pemerintahan dan partai-partai politik yang tidak menghiraukan suara rakyat, perlawanan terhadap belum membaiknya taraf kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, politik, hukum dan budaya. Golput merupakan respon atas ketidakmampuan partai atau penguasa dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat yang telah menerima mandat.

6. Latar Belakang Timbulnya Golput

Golput (non-voting behaviour) dalam konteks politik Indonesia memiliki rentang sejarah yang panjang. Sebagaimana disebutkan di atas, pemerintahan Orde Baru ingin merombak sistem kepartaian di Indonesia, dengan mendasarkan pada konsep Ali Murtopo. Inti dari konsep tersebut adalah gagasan "massa mengambang".

Konsep bahwa rakyat akan menyibukkan dirinya dalam usaha-usaha pembangunan mengingatkan seseorang pada gagasan "perkakas yang bersuara" yang biasa terdapat dalam masyarakat perbudakan. Rakyat pedesaan, yang merupakan mayoritas penduduk pada tahun 1965, benar-benar diarahkan hanya untuk bekerja, berproduksi dan tak memiliki kesempatan berperan dalam ranah

politik (Rudi Hartono 2000:54). Pada gilirannya konsep tersebut membawa petaka besar bagi perjalanan demokrasi Indonesia.

Upaya perampangan konstestan pemilu lewat sistim try kepartaian ini nyatanya mengubah dari partisipasi politik aktif ke partisipasi politik pasif. Akibatnya menguatnya posisi negara dan rakyat terus tersubordinasi. Kenyataan ini bentuk dari intervensi negara dan hilangnya kebebasan rakyat ditengah penegakan demokrasi. Jika pada awalnya golput hanya sebagai gerakan moral atas suatu keprihatinan, maka gerakan golput pada pemilu-pemilu berikutnya lebih dari sikap kekecewaan. Karena segala kekuatan partai dan lembaga negara dijadikan tameng kekuasaan semata. Para elit politik hanya menjadi corong penguasa.

Pada era ini golput menjadi bentuk kekecewaan dan perlawanan, karena rakyat tidak cukup berani melawan dalam bentuk revolusi berhadapan dengan kekuatan militer. sebagaimana dikatakan Closky bahwa:“Ada yang tidak ikut pemilihan karena sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh, atau kurang paham mengenai, masalah politik. Ada juga karena tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil dan ada juga yang sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan dimana ketidak ikut sertaan merupakan hal yang terpuji”.

Pada Pemilu 2004, angka golput begitu tinggi dan angka ini juga menjalar kepemilihan kepala daerah. Golput selain dipicu oleh kekecewaan terhadap elit-elit partainya serta pada pemerintah juga sebagai bentuk perlawanan. Di samping itu, golput terjadi sebagai akibat dari polarisasi kepemimpinan politik dalam

masyarakat atas dasar simbiosis antara patron dan klient-nya manakala sang patron tidak terakomodasi dalam struktur politik tertentu.

Menurut Varma terjadinya golput dinegara berkembang seperti Indonesia lebih disebabkan oleh rasa kecewa dan apatisme: “Di negara berkembang lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena terjadi paradoks demokrasi atau terjadi kontraproduktif dalam proses demoratisasi.

Secara empirik peningkatan angka Golput tersebut terjadi antara lain oleh realitas sebagai berikut :

1. Pemilu dan Pilkada langsung belum mampu menghasilkan perubahan berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Menurunnya kinerja partai politik yang tidak memiliki platform politik yang realistis dan kader politik yang berkualitas serta komitmen politik yang berpihak kepada kepentingan publik, melainkan lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau golongannya.
3. Merosotnya integritas moral aktor-aktor politik (elit politik) yang berperilaku koruptif dan lebih mengejar kekuasaan/kedudukan daripada memperjuangkan aspirasi publik.
4. Tidak terealisasinya janji-janji yang dikampanyekan elit politik kepada publik yang mendukungnya.

5. Kejenuhan pemilih karena sering adanya Pemilu/Pilkada yang dipandang sebagai kegiatan seremonial berdemokrasi yang lebih menguntungkan bagi para elit politik.
6. Kurang netralnya penyelenggara Pemilu/Pilkada yang masih berpotensi melakukan keberpihakan kepada kontestan tertentu, di samping juga kurangnya intensitas sosialisasi Pemilu secara terprogram dan meluas.

Karena itu golput mengindikasikan adanya beberapa hal berikut ini:

- (1) perlawanan terhadap rejim
- (2) ketidakpercayaan terhadap sistem dan calon yang ada
- (3) kekecewaan yang besar terhadap pemerintah dan system, serta
- (4) putusnya harapan rakyat akan lahirnya sistem dan kepemimpinan yang mampu mengayomi mereka.

Dan terkadang hanya dengan cara demikian kemapanan demokrasi yang mengandalkan berfungsinya check and ballances itu dapat tercipta, kendati tidak selalu demikian adanya. Selain alasan di atas, nyatanya perilaku golput juga bagian dari refleksi hal-hal sebagai berikut :

1. Apatisme politik, yaitu sikap tidak berminat atau tidak menaruh perhatian terhadap orang, situasi, atau gejala-gejala umum yang berkait dengan persoalan politik dan kelembagaannya.
2. Sinisme politik merupakan sikap yang dimiliki sebagai penghayatan atas tindakan dan motif orang atau lembaga lain dengan perasaan curiga. Orang-orang sinis selalu menganggap politik itu kotor, bahwa semua politisi tak

dapat dipercaya, bahwa rakyat selalu menjadi korban manipulasi partai dan penguasa, dan bahwa setiap rejim selalu dipimpin orang tak amanah.

3. Aienasi merupakan perasaan keterasingan dari kehidupan politik dan pemerintahan, sehingga selalu memandang segenap peraturan yang ada sebagai tidak adil dan menguntungkan penguasa,
4. Anomi yaitu perasaan kehilangan nilai dan orientasi hidup, sehingga tak bermotivasi untuk mengambil tindakan yang berarti karena hilangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik yang ada.

Berdasarkan kerangka demikian, menurut Hendar di golput juga merupakan pilihan rasional bila dilihat dari kaca mata berikut ini :

1. Pilihan golput harus dilihat sebagai upaya membuka ruang kebebasan pemilu yang lain. Memilih atau mencoblos suatu partai atau calon presiden bukanlah satu-satunya pilihan. Warga negara membuka suatu ruang lain dalam mengekspresikan pilihannya untuk tidak memilih partai atau calon presiden apa pun karena pertimbangan-pertimbangan rasional dan teologis.
2. Munculnya golput di Indonesia pada awal dasawarsa 1970-an adalah ekspresi sikap kritis.
3. Menyimak perilaku politisi baik di pusat dan daerah, telah banyak mengecewakan warga negara yang telah memilihnya.

7. Pengertian Golput dalam Pemilu

Bangsa Indonesia sejak tahun 1955 hingga 2009 sudah melaksanakan 10 kali pemilihan umum legislatif (pileg). Masyarakat hampir tiap tahun mengalami pemilu, pilukada dan bahkan pilkades. Penyelenggaraan pemilu

yang berulang tak juga memberikan banyak hal terkait perbaikan nasib bagi masyarakat. Fakta dalam setiap pelaksanaan pemilu masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya selalu ada dan cenderung meningkat dari setiap pelaksanaan pemilu. Perilaku tidak memilih pemilih di Indonesia dikenal dengan sebutan golput.

Kata golput adalah singkatan dari golongan putih. Makna inti dari kata golput adalah tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu dengan berbagai faktor dan alasan. Fenomena golput sudah terjadi sejak diselenggarakan pemilu pertama tahun 1955, akibat ketidaktahuan atau kurangnya informasi tentang penyelenggaraan pemilu. Biasanya mereka tidak datang ke tempat pemungutan suara.

Golput tidak hanya terjadi dalam pemilu legislatif. Dalam perhelatan politik di tingkat lokal seperti pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) gejala golput juga terjadi.

Istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu pertama zaman Orde Baru tahun 1971. Pemrakarsa sikap untuk tidak memilih itu, antara lain Arief Budiman, Julius Usman dan almarhum Imam Malujo Sumali. Langkah mereka didasari pada pandangan bahwa aturan main berdemokrasi tidak ditegakkan, cenderung diinjak-injak (Fadillah Putra ;2003 ; 104).

Golput menurut Arif Budiman bukan sebuah organisasi tanpa pengurus tetapi hanya merupakan pertemuan solidaritas (Arif Budiman). Sedangkan Arbi Sanit mengatakan bahwa golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan

pada segenap problem kebangsaan, sasaran protes dari dari gerakan golput adalah penyelenggaraan pemilu.

Mengenai golput alm. K.H. Abdurrahman Wahid pernah mengatakan “ kalau tidak ada yang bisa di percaya, ngapain repot-repot ke kotak suara? Dari pada nanti kecewa (Abdurrahman Wahid, dkk, 2009; 1). Sikap orang-orang golput, menurut Arbi Sanit dalam memilih memang berbeda dengan kelompok pemilih lain atas dasar cara penggunaan hak pilih. Apabila pemilih umumnya menggunakan hak pilih sesuai peraturan yang berlaku atau tidak menggunakan hak pilih karena berhalangan di luar kontrolnya.

Kaum golput menggunakan hak pilih dengan tiga kemungkinan :

1. Mmasuk lebih dari satu gambar partai.
2. Menusuk bagian putih dari kartu suara.
3. Tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih.

Bagi mereka, memilih dalam pemilu sepenuhnya adalah hak. Kewajiban mereka dalam kaitan dengan hak pilih ialah menggunakannya secara bertanggungjawab dengan menekankan kaitan Sumber penyerahan suara kepada tujuan pemilu, tidak hanya membatasi pada penyerahan suara kepada salah satu kontestan pemilu (Arbi Sanit ; 1992)

Jadi berdasarkan hal di atas, golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu. Dengan demikian, orang-orang yang berhalangan hadir di

Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau terluput dari pendaftaran, otomatis dikeluarkan dari kategori golput.

Begitu pula persyaratan yang diperlukan untuk menjadi golput bukan lagi sekedar memiliki rasa enggan atau malas ke TPS tanpa maksud yang jelas. Pengecualian kedua golongan ini dari istilah golput tidak hanya memurnikan wawasan mengenai kelompok itu, melainkan juga sekaligus memperkecil kemungkinan terjadinya pengaburan makna, baik di sengaja maupun tidak.

Eep Saefulloh Fatah, mengklasifikasikan golput atas empat golongan :

1. Golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah.
2. Golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu).
3. Golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pemilu legislatif/pemilukada akan membawa perubahan dan perbaikan.
4. Golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain (dalam Hery M.N. Fathah).

Sedangkan menurut Novel Ali (1999;22) di Indonesia terdapat dua kelompok golput Pertama, adalah kelompok golput awam. Yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja.

Kedua, adalah kelompok golput pilihan. Yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang belum ada. dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibandingkan golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.

Angka masyarakat yang tidak memilih atau golput dari pemilu ke pemilu terus meningkat. Harus ada upaya yang maksimal untuk meminimalisir meningkatnya angka masyarakat yang tidak memilih dalam pemilu. Karena kualitas pemilu secara tidak langsung juga dilihat dari legitimasi pemimpin yang terpilih. Semakin kuat dukungan rakyat semakin kuatlah tingkat kepercayaan rakyat.

8. Teori Perilaku Golput

Secara garis besar perilaku golput (voting behavior) dapat didekati dari dua model, yaitu:

1. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologi ini disebut juga madhab Columbia (The Columbia School of Electoral Behavior). Pendekatan ini menjelaskan karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang. Pengelompokan seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama dan sebagainya diyakini punya peranan penting mengkonstruksi pola pikir pemilih.

Pemahaman akan ikatan-ikatan keagamaan, profesi, kelompok bisnis, keluarga dan kelompok informal merupakan sesuatu yang sangat vital. Dean Jaros menguatkan bahwa perilaku politik seseorang berhubungan erat dalam satuan keanggotaan kelompok tertentu.

Gerard Pomper lebih tegas menjelaskan pengaruh pengelompokan sosial dalam kaitannya dengan perilaku golput. Baginya perilaku golput dapat diletakkan dalam bingkai predisposisi sosial-ekonomi keluarga pemilih dan predisposisi sosial-ekonomi pemilih sendiri. Keduanya mempunyai hubungan signifikan dengan perilaku memilih seseorang. Maksudnya kondisi ayah dan ibu pemilih akan berpengaruh pada perilaku politik anak, termasuk dalam memilih agama yang dianut, tempat tinggal, dan kelas sosial.

Hubungan agama, organisasi sosial dan pilihan politik misalnya dapat dilihat pada masyarakat Madura yang mayoritas santri dimana sebagian besar afiliasi politiknya ke PKB dan PPP sebagai basis partai relegius. Artinya pendekatan sosiologi melihat perilaku golput seseorang sangat dipengaruhi

oleh bagaimana pola hidup seseorang dan bagaimana dia menempatkan dirinya dalam katagori-katagori sosial di atas. Kelompok sosial itulah yang turut membentuk kesadaran ataupun kehendak perilaku politiknya.

2.Pendekatan Psikologi

Pendekatan psikologi berkembang di Michigan yang dipelopori oleh August Cambell. Ketidak puasan pendekatan sosiologi melahirkan pendekatan psikologi. Konsep yang dikembangkan adalah konsep sosialisasi dan sikap dalam melihat perilaku memilih. Aktivitas memilih sangat ditentukan oleh kekuatan sosialisasi yang diterima oleh anak sejak masa kecil. Oleh karena itu, dalam pendekatan psikologi ditekankan pada tiga aspek utama, yaitu: ikatan emosional pada suatu partai politik tertentu, orientasi isu-isu dan orientasi pada kandidat.

Bagi psikolog, sikap merupakan refleksi fungsi kepentingan. Penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut. Sikap juga berfungsi sebagai penyesuaian diri. Individu bersikap tertentu merupakan akibat dari keinginan orang tersebut untuk sama ataupun beda dengan orang lain, termasuk panutannya. Sikap juga berfungsi untuk mengatasi konflik internal, seperti idealisasi, rasionalisasi dan indentifikasi.

Sikap bukanlah suatu hal yang langsung jadi, terdapat proses panjang yang membentuknya baik melalui informasi, maupun pendisiplinan. Maka sikap seseorang dibentuk sejak kecil hingga dewasa sikap politikpun ditentukan pada saat dewasa ketika menghadapi situasi di luar keluarga yang itu dipengaruhi oleh kelompok acuan, organisasi, asosiasi dan partai politik.

Sosialisasi membentuk ikatan psikologi yang begitu kuat antara seseorang dengan organisasi kemasyarakatan atau partai politik yang berupa simpati (David Apter,2000:197)

Selanjutnya ikatan itu mewujud dalam bentuk identifikasi. Selain dua model pendekatan di atas, terdapat hal lain yang mempengaruhi seseorang untuk tidak memilih, yaitu:

1.Faktor Psikologi

Pribadi yang tak toleran, otoriter dan acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, dan sejenisnya cenderung sikap politiknya abstain (golput). Sebab apa yang diperjuangkan oleh kandidat atau partai tidak asosiasi dan partai politik. Sosialisasi membentuk ikatan psikologi yang begitu kuat antara seseorang dengan organisasi kemasyarakatan atau partai politik yang berupa simpati.

2.Faktor Sosial-ekonomi

Tingkat pendidikan yang tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping seseorang dimungkinkan menguasai aspek-aspek birokrasi baik pada saat pendaftaran ataupun pada waktu pemilihan. Demikian juga, pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja disektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi partisipasinya dalam pemilu dibandingkan dengan pemilih yang bekerja disektor yang tidak berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

3.Faktor Kepercayaan

Politik Ketidak aktifan pemilih (golput) merupakan bentuk ketidakpercayaan pada sistem politik. Maka golput merupakan tindakan pada apa yang disebut tidak mendukung sistem politik yang sedang dijalankan.

9. Golput dan Demokrasi

Golput (non-voting behaviour) dipahami sebagai bentuk partisipasi politik warga negara yang muncul karena beragam latar belakang. Memilih adalah hak (right) politik warga negara yang by its nature mengandung arti legal or moral entitlement (authority to act), yang mengandung kebebasan pemilik hak itu untuk menggunakan atau tidak menggunakannya. Karena esensi filosofis inilah maka demokrasi memberi ruang bagi pilihan untuk golput secara setara dengan pilihan untuk memilih.

Golput diberi ruang dalam demokrasi, guna meluruskan demokrasi, meluruskan politik dan pemerintahan yang korup melalui gerakan moral. Bagi kalangan pendukung golput, golput diancangkan sebagai gerakan check and balances yang dalam demokrasi dibutuhkan. Disisi lain, eskalasi golput juga sangat menghawatirkan perkembangan demokrasi yang berkualitas karena merosotnya kredibilitas kinerja partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik. Kehawatiran ini juga dikemukakan Anthony Giddens“haruskah kita menerima lembaga-lembaga demokrasi tersingkir dari titik di mana demokrasi sedang mara. Demokrasi identik dengan kebebasan dan partisipasi dari semua kekuatan demokrasi. Kekuatan demokrasi dimaksud

di dalamnya termasuk masyarakat, selain juga partai politik dan organisasi masyarakat.

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri dari modernisasi politik. Sikap dan persepsi bagian penting dari pesta demokrasi. Maka tingginya angka golput menandakan sistem politik dan sistem pemilu yang sedang dijalankan belum berada dalam ruang demokrasi sesungguhnya. Huntington dan Nelson memaknai partisipasi politik sebagai. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi biasa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Dengan demikian, partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain (golput) yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh pemerintah. Partisipasi politik tidak mencakup kegiatan pejabat-pejabat birokrasi, pejabat partai, dan lobbyist professional yang bertindak dalam konteks jabatan yang diembannya. Sementara Budiardjo memaknai partisipasi politik sebagai: Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan Pemerintah (public policy).

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau dengan anggota parlemen, dan sebagainya” (M.Budiarjo,2001:196).

Merujuk pemikiran politik tersebut dalam konteks sejarah penyelenggaraan pemilihan umum sebagai pesta demokrasi, secara empirik dapat dicermati tingkat partisipasi politik dan perkembangan golput di Indonesia. Tingginya partisipasi rakyat pada penyelenggaraan pemilu masa Orde Baru bukan berdasarkan apa yang dikatakan Budiharjo sebagai kesukarelaan, melainkan mobilisasi massa yang sengaja digerakkan. Maka partisipasi demikian merupakan partisipasi semu, partisipasi yang didasarkan pada harmonisasi dan suatu waktu akan menjadi ledakan emosi seperti lahirnya gelombang golput di era reformasi. Penilaian Hantington dapat menjelaskan dengan cermat tentang hal tersebut yang menyatakan:

“Beberapa studi secara eksplisit tidak menganggap tindakan yang dimobilisasikan atau yang dimanipulasikan sebagai partisipasi politik, yaitu lebih menekankan sifat sukarela dari partisipasi dengan argumentasi bahwa menjadi anggota organisasi atau menghadiri rapat-rapat umum atas perintah pemerintah tidak termasuk partisipasi politik”. Lebih lanjut Hantington membedakan partisipasi politik kedalam dua karakter, yaitu : a. Partisipasi yang demokratis dan otonom adalah bentuk partisipasi politik yang sukarela; b. Partisipasi yang dimanipulasi, diarahkan, dan disponsori oleh pemerintah

adalah bentuk partisipasi yang dimobilisasikan Oleh karenanya, tingginya angka golput dapatlah dirumuskan bagian dari kesadaran perilaku politik.

Dalam tahapan demokrasi elektoral atau demokrasi prosedural, golput adalah manifestasi politik, dimana rakyat tidak berpartisipasi politik (menggunakan hak pilihnya) secara sukarela dalam pemilihan umum sebagai pesta demokrasi. Secara faktual fenomena golput tidak hanya terjadi di negara demokrasi yang sedang berkembang, di negara yang sudah maju dalam berdemokrasi pun juga menghadapi fenomena golput, seperti di Amerika Serikat yang capaian angka partisipasi politik pemilihnya berkisar antara 50% s/d 60%, begitu pula di Perancis dan Belanda yang angka capaian partisipasi politik pemilihnya berkisar 86% Karenanya fenomena Golput menjadi pembelajaran bagi partai politik dan penguasa untuk meningkatkan kinerjanya sebagai mesin kerja demokrasi yang efektif dan memiliki komitmen yang kuat, mewujudkan good public governance.

Ketidakmampuan partai politik dan pemerintah menampilkan kinerja tersebut, maka fenomena Golput akan mengkristal menjadi faktor internal demokrasi yang potensial menimbulkan pembusukan demokrasi atau pembusukan politik (Political Decay), sehingga akan berimplikasi melumpuhkan demokrasi, dimana partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik dalam demokrasi secara moral ikut bertanggungjawab. Kiranya perlu mendapatkan apresiasi dan solusi oleh para aktor-aktor pemerintahan (penyelenggara negara) agar pesta demokrasi lebih efisien dan berkualitas secara sistemik, baik dalam tataran input, process, dan output, dan

malah bukan bersifat kontra produktif dalam berdemokrasi. Sebab bagaimanapun juga golput merupakan bagian dari indikator keberhasilan pemilu yang demokratis. Artinya kehadiran golput justru mendorong peningkatan kualitas proses dan bangunan demokrasi itu sendiri.

Dengan demikian, golput dapat diletakkan bagian dari gerakan sosial yang menghendaki adanya perubahan sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Salah satu pendekatan teori-teori ilmu sosial yang justru melihat gerakan sosial sebagai “fenomena positif”, atau sebagai sarana konstruktif bagi perubahan sosial. Pendekatan ini merupakan alternatif terhadap fungsionalisme, pendekatan sosial semacam ini selanjutnya dikenal dengan “teori konflik”. Teori konflik pada dasarnya menggunakan tiga asumsi dasar, yaitu: (1) Rakyat dianggap sebagai sejumlah kepentingan dasar dimana mereka akan berusaha secara keras untuk memenuhinya, (2) Kekuasaan adalah inti dari struktur sosial dan hal ini melahirkan perjuangan untuk mendapatkannya, dan (3) Nilai dan gagasan adalah senjata konflik yang digunakan oleh berbagai kelompok untuk mencapai tujuan masing-masing, dari pada sebagai alat mempertahankan identitas dan menyatukan tujuan masyarakat.

Pada dasarnya, gerakan sosial senantiasa berkaitan dengan perubahan menuju suatu arah yang dianggap ideal oleh para penggerakannya. Dengan bahasa lain, gerakan sosial dan perubahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Asal usul gerakan sosial dapat ditelusuri dari reaksi para pemikir Perancis. Sebut saja tokoh seperti Marx dan Engels, Gramsci serta Lenin untuk mewakili gerakan ini.

10. Tujuan Golput

Bagi pendukung golput, perilaku tidak memilih bagian dari tindakan yang memiliki pesan. Karenanya golput bukan tanpa tujuan, golput menjadi alat protes politik yang tidak sempat tersuarakan, akumulasi kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap realitas politik yang dilihat kemudian disalurkan melalui sikap apatis terhadap pemilu. Sebab itu, melihat golput harus dapat mengkontekstualisasikan dengan keadaan dan realitas yang berkembang. Interpretasi perilaku politik tidak dapat diserahkan pada penjelasan teoritis semata.

Namun juga harus diletakkan pada logika pendukung golput itu sendiri untuk menangkap makna dan substansi: pesan apa yang hendak disampaikan kepada publik atas pilihan politiknya untuk tidak memilih. Sebagian pemilih tidak menggunakan haknya hanya untuk menunjukkan sekedar rasa malasnyanya. Malas berdasarkan kesadarannya bahwa politik tidak dapat menjamin perbaikan hidupnya. Hidup dan mati mereka tidak bisa ditentukan oleh hasil pemilu.

Terlebih pemilu dan politik cenderung diwarnai oleh pertikaian kepentingan sesaat. Sebagian yang lain tidak menggunakan hak pilihnya untuk menunjukkan ketidak sukaannya dengan sistem politik yang dibangun, pemerintahan yang sedang berkuasa, tiadanya rasa amanah pemimpin yang sedang berkuasa, carut-marutnya supremasi hukum dan semacamnya. Sebagian lainnya juga melakukan golput untuk mengutarakan kekusarannya atas perilaku elit politik yang tak sesuai dengan janji-janji saat pemilu.

Maka perilaku golput sejujurnya secara umum dimaksudkan sebagai simbol protes atas sistem yang tidak adil, sistem yang hanya menguatkan posisi kelompok minoritas (elit) dan mengabaikan substansi demokrasi yang bertujuan membangun peradaban masyarakat yang lebih baik (Santoso Slamet, 2002:45). Yang terpenting lagi adalah golput ditujukan pada tiadanya amanah dari elit dan pemimpin bangsa dalam menjalankan roda kekuasaannya. Protes tersebut ditujukan pada pemerintah yang korup dan tidak akuntabel. Maka kondisi demikian menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat luas Sistem politik yang dikembangkan pemerintah sejak orde baru hingga orde reformasi ini dinilai tidak mampu membangun demokrasi yang sehat, baik pada tingkat elit maupun pada wilayah massa.

Praktek kongkalikong, kolusi dan nepotisme cermin yang terang akan fakta dan realitas politik yang ada akibat elit politik yang memegang etika dan tanggung jawab atas kekuasaan yang diraihinya. Parlemen yang seharusnya konsisten dengan fungsinya, juga ikut ambil bagian dari cerita buram ini. Inilah bentuk ketidak jelasan sistem yang dijalankan dan melahirkan anak ideologis yang disebut golongan putih (golput).

Pendukung golput tidak hanya berasal dari satu garis partai, melainkan seluruh partai dan organ-organ sosial. Semuanya melihat dengan jelas betapa massif retorika politik yang dibangun untuk mengelabui rakyat. Karenanya parlemen dan pemerintah dinilai penyebab lahirnya diskriminasi sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya di negara ini.

Golput pada pemilu 2004, 2009 dan 2019 juga ditunjukkan sebagai reaksi pada sistem pemilu yang amburadul, mulai dari pendataan hak pilih, ketentuan partai politik sebagai peserta, dan mekanisme penentuan caleg, yang semuanya dinilai masih tidak mencerminkan kemauan rakyat. Terlebih pemilu 2004 juga tidak bisa menjanjikan perubahan, lebih ironis lagi sistem pemilu 2004 dinilai mengalami kemunduran dari pada pemilu-pemilu sebelumnya. Gerakan golput yang sempat menurun pada pemilu 1999, mulai meninggi lagi pada 2004, berbagai kejanggalan pembuatan UU pemilu di DPR turun menyuburkan golput. Sebab itu, golput hadir bukan tanpa dasar. Pertama, perumusan UU pemilu lebih mencari titik temu antar kepentingan elit dari pada substansi kualitas pemilu dan demokrasi. Kedua, sistem pemilu proporsional diyakini tak akan menjanjikan apapun. Ketiga, tidak tegasnya ketentuan 30 persen kuota politisi perempuan, dan keempat, amburadulnya DPT nasional yang terbongkar pada contoh pilgub Jatim lalu juga menjadi alasan mereka untuk kecewa dan tak percaya dengan pemilu. Maka tak ayal gerakan golput tak dapat dibendung.

11. Bentuk-Bentuk Golput

Perilaku nonvoting adalah refleksi protes atau ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan. Menurut (Arbi Sanit 1996:2) Karena itu bentuk perilaku golput yang ditampilkan tidak seragam, melainkan beragam. Sekalipun demikian, perilaku golput dalam pemilu diwujudkan secara umum dalam bentuk:

1. Memilih tidak hadir ke bilik suara. Sikap ini tidak lain merupakan bentuk protes yang paling nyata. Sikap apatis dan tak mau menggunakan hak pilihnya ini didasarkan pada empat hal, yaitu :

a. Sebagai reaksi terhadap pemerintah, anggota DPR dan partai politik yang tak mampu memperbaiki kehidupan ekonomi, sosial dan hukum. Berbagai kebijakan pemerintah telah jauh keluar dari track demokrasi, yaitu menyejahterakan kehidupan rakyat.

b. Tidak adanya nilai lebih dari proses pemilu ini. Sehingga mereka merasa rugi menghadiri pemilu baik secara tenaga, waktu dan finansial. Nilai lebih ini meliputi kualitas pemilu yang dengannya masyarakat merasa nyaman dan yakin akan pemerintahan yang akan memimpin karena lahir dari proses jujur dan adil.

c. Adanya hal yang lebih penting dari sekedar hadir ke bilik suara. Hal penting ini dikaitkan dengan nilai lebih di atas. Artinya jika dengan memberikan suarapun tak dapat merubah apapun, maka mereka berkeyakinan lebih baik tidak datang.

d. Ketidak hadiran karena malas saja, mereka tak mau repot dengan politik yang dinilai kotor. Cara ini ditempuh sebagai bentuk penyadaran dan membuka mata para pejabat negara, elit politik, anggota dewan dan aktivis partai politik bahwa selama ini rakyat selalu diabaikan dan dibutuhkan pada saat pemilu saja.

2. Mencoblos semua gambar atau gambar kandidat lebih dari satu kali. Cara ini dipilih didasarkan pada

- a. Kehadiran mereka tetap sebagai bentuk protes, walaupun mereka hadir itu dengan tujuan agar kertas suara mereka tak digunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
 - b. Isu-isu yang dibawa semua partai dan kandidat hanyalah retorika saja, maka respon pendukung golput dengan mencoblos semuanya sebagai jawaban yang menurut pendukung golput rasional.
 - c. Pemilu di Indonesia bagi pendukung golput belum bisa dijalankan secara jujur dan adil, maka pilihan mencoblos semua gambar diyakini paling realistis.
 - d. Memberikan dorongan pada publik agar publik tampil berani menampilkan kekecewaannya secara terang-terangan, tanpa rasa takut.
3. Memasukkan kertas suara ke kotak secara kosongan (tanpa dicoblos). Cara ini merupakan cara yang paling lemah dalam pandangan pendukung golput.

Hal ini dilakukan sebagai sikap transparan dan dengan tujuan mereka yang selama ini takut melampiaskan kekecewaannya mendapatkan teman sehingga punya keberanian.

B. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum (Pemilu) menurut Haris (2006:10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal,

yang diharapkan bisa menceerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah:“Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”Huntington dalam Rizkiyansyah(2007:3) menyatakan bahwa sebuah Negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite”.

Menurut Karim dalam Dani (2006:11) pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat Menurut Rahman (2002:194), pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Sedangkan, Rizkiyansyah (2007:3)“ Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum”. Penjelasan

diatas menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945.

1. Teori-Teori Pemilihan Umum

Permana dalam Pradhanawati (2005:85) kata kunci dari pemilu langsung oleh rakyat adalah “kedaulatan rakyat”. Dengan demikian, reputasi demokrasi tidak diragukan lagi adalah pemaknaan yang sesungguhnya dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Schumpeter (dalam Sorensen, 2003:14) merumuskan pengertian demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara.

Pengertian demokrasi menunjukkan bahwa keikutsertaan rakyat merupakan kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokrasi. Keikutsertaan rakyat dalam sistem pemerintahan bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat itu sendiri maupun melalui perwakilan hal tersebut dapat terwujud dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum di Negara Indonesia. Henry B. Mayo (dalam Budiarto, 2006:117) memberikan definisi demokrasi sebagai berikut: Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas

prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Budiarjo (2006:118) disimpulkan“ bahw demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, karena itu juga mengandung unsur-unsur moril. Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (values)". Adapun nilai-nilai dalam demokrasi tersebut menurut Mayo (dalamBudiarjo, 2008: 118) adalah:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peaceful statement of conflict),
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peacefullchangeinachangingsociety),
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimumofcoercion),
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman,
6. Menjamin tegaknya keadilan

Lary Diamond ,Juan Jlinz dan Seymour Martin Lipset (dalamSorensen,2003:19) memaknai demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang memenuhi tiga kondisi-kondisi berikut :

1. Kompetisi yang luas dan bermakna diantara individu dan kelompok organisasi (khususnya partai-partai politik) pada seluruh posisi kekuasaan pemerintah yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan;

2. Tingkat partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur, dan tidak ada kelompok sosial (dewasa) utama yang disingkirkan;
3. Tingkat kebebasan politik dan sipil, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota 11 organisasi, yang cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik.

Berdasarkan nilai-nilai beserta kondisi-kondisi demokrasi di atas maka dalam pemilihan umum juga terdapat nilai-nilai dan kondisi-kondisi tersebut. Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai suatu “pesta demokrasi” di negara Indonesia. Mencermati praktik Pemilu dalam sistem politik modern, Eef Saefullah Fatah (dalam Rizkiyansyah, 2007:4) menyatakan bahwa: “Pemilu dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu :

1. Pemilu sebagai formalitas politik, yakni, Pemilu hanya dijadikan alat legalisasi pemerintahan nondemokratis. Pemilu sendiri dijalankan secara tidak demokratis;
2. Pemilu sebagai alat demokrasi, Pemilu dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif, dan adil. Pemerintah yang menyelenggarakan Pemilu bahkan kerap kali menerima kenyataan bahwa Pemilu yang mereka adakan justru menyingkirkan mereka dari tampuk kekuasaan.

”Pemilu kepala daerah yang dilaksanakan di Indonesia saat ini merupakan pemilu yang ditempatkan pada tipe kedua yaitu pemilu sebagai alat demokrasi untuk menciptakan suatu pemerintahan yang representatif yang dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif dan adil, berbeda dengan

pemilu-pemilu yang dilaksanakan pada zaman orde baru. Pemilu pada zaman orde baru merupakan pemilu tipe pertama yaitu sebagai formalitas politik untuk melegalisasi pemerintahan Soeharto. Fungsi pemilu antara lain seperti yang diungkapkan oleh Sanit (dalam Pito, 2007:307) yang mengklasifikasikan ada empat fungsi pemilihan umum, yaitu:

1. Legitimasi politik
2. Terciptanya perwakilan politik
3. Sirkulasi elite politik
4. Pendidikan politik.

Selain fungsi yang diungkapkan oleh Sanit, pemilu juga memiliki fungsi seperti yang diungkapkan oleh Aurel Croisant (dalam Pito, 2007:306) yang menyatakan secara fungsional pemilu harus memenuhi tiga tuntutan yaitu :

1. Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih
2. Pemilu harus dapat mengintegrasikan rakyat
3. Keputusan.

Sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup besarguna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (governabilitas).

Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa melalui pemilu sistem demokrasi dapat diwujudkan. Legitimasi kekuasaan yang diperoleh pemerintah menjadi kuat dan absah karena hal tersebut merupakan hasil pikiran rakyat yang memiliki kedaulatan. Selain sebagai mekanisme

demokrasi, pemilu ini juga memiliki tujuan sebagai pendidikan politik rakyat yang dapat menumbuh kembangkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajiban politiknya. Makna demokrasi dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan system demokrasi salah satunya adalah melalui pemilihan umum yang melibatkan partisipasi politik warga negara sebanyak-banyaknya. Partisipasi politik merupakan kriterium penting demokrasi. Krisis partisipasi politik terjadi jika tindakan-tindakan tidak tertampung atau tersalurkan melalui dewan perwakilan, media massa, organisasi-organisasi sosial politik lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga yang sah lainnya.

Krisis partisipasi menurut Kusumowidagdo (dalam Rais, 1986:158), adalah konflik atau bentrokan yang terjadi apabila elite pemerintah Menganggap tidak sah tuntutan-tuntutan atau tingkah laku individu-individu atau kelompok yang ingin berperan serta dalam sistem politik (Negara). Beberapa kondisi yang dapat menimbulkan krisis partisipasi (Kusumowidagdo, dalam Rais, 1986: 158) yaitu:

1. Jika elite pemerintah menganggap dirinya saja yang berhak memerintah oleh karena itu menolak tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial politik untuk berperan serta dalam pemerintahan.
2. Jika organisasi-organisasi yang dibentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk menyalurkan kepentingan mereka dianggap tidak sah oleh pemerintah.
3. Cara-cara yang digunakan kelompok-kelompok masyarakat dianggap tidak sah oleh elite pemerintahan

4. Jika jenis tuntutan yang dikemukakan kelompok-kelompok masyarakat dianggap tidak sah oleh pemerintah. Sistem yang demokratis, tujuan dari pelaksanaan pemilu pun harus mencerminkan adanya kehendak dan partisipasi rakyat.

Pemilihan Umum memiliki beberapa tujuan. Menurut Surbakti (2009:181) ada tiga hal dalam tujuan Pemilu, yaitu:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan umum.
2. Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat yang terpilih melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi tetap terjaga
3. Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Berdasarkan pemaparan dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa demokrasi saat ini merupakan sistem pemerintahan yang memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat. Baik hak untuk ikut serta dalam pemerintahan maupun haknya sebagai warga sipil. Dalam demokrasi, rakyat harus diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan politik, termasuk dalam menentukan seorang pemimpin. Salah satu upaya untuk mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan adalah melalui pemilihan umum.

C. Kerangka Pemikiran

Perilaku nonvoting adalah refleksi protes atau ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan. Menurut (Arbi Sanit 1996:2) Karena itu bentuk perilaku golput yang ditampilkan tidak seragam, melainkan beragam. Sekalipun demikian, perilaku golput dalam pemilu diwujudkan secara umum dalam bentuk:

1. Memilih tidak hadir ke bilik suara. Sikap ini tidak lain merupakan bentuk protes yang paling nyata. Sikap apatis dan tak mau menggunakan hak pilihnya ini didasarkan pada empat hal, yaitu :
 - a. Sebagai reaksi terhadap pemerintah, anggota DPR dan partai politik yang tak mampu memperbaiki kehidupan ekonomi, sosial dan hukum. Berbagai kebijakan pemerintah telah jauh keluar dari track demokrasi, yaitu menyejahterakan kehidupan rakyat.
 - b. Tidak adanya nilai lebih dari proses pemilu ini. Sehingga mereka merasa rugi menghadiri pemilu baik secara tenaga, waktu dan finansial. Nilai lebih ini meliputi kualitas pemilu yang dengannya masyarakat merasa nyaman dan yakin akan pemerintahan yang akan memimpin karena lahir dari proses jujur dan adil.
 - c. Adanya hal yang lebih penting dari sekedar hadir ke bilik suara. Hal penting ini dikaitkan dengan nilai lebih di atas. Artinya jika dengan memberikan suarapun tak dapat merubah apapun, maka mereka berkeyakinan lebih baik tidak datang.

- d. Ketidak hadirannya karena malas saja, mereka tak mau repot dengan politik yang dinilai kotor. Cara ini ditempuh sebagai bentuk penyadaran dan membuka mata para pejabat negara, elit politik, anggota dewan dan aktivis partai politik bahwa selama ini rakyat selalu diabaikan dan dibutuhkan pada saat pemilu saja.
2. Mencoblos semua gambar atau gambar kandidat lebih dari satu kali. Cara ini dipilih didasarkan pada
 - a. Kehadiran mereka tetap sebagai bentuk protes, walaupun mereka hadir itu dengan tujuan agar kertas suara mereka tak digunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
 - b. Isu-isu yang dibawa semua partai dan kandidat hanyalah retorika saja, maka respon pendukung golput dengan mencoblos semuanya sebagai jawaban yang menurut pendukung golput rasional.
 - c. Pemilu di Indonesia bagi pendukung golput belum bisa dijalankan secara jujur dan adil, maka pilihan mencoblos semua gambar diyakini paling realistis.
 - d. Memberikan dorongan pada publik agar publik tampil berani menampilkan kekecewaannya secara terang-terangan, tanpa rasa takut.
 3. Memasukkan kertas suara ke kotak secara kosong (tanpa dicoblos). Cara ini merupakan cara yang paling lemah dalam pandangan pendukung golput.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran